

**IMPLEMENTASI PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM
PEMENUHAN KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : LARISSA ZUCHNI AURORA

NIM : 126231133

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

**LAPORAN TUGAS AKHIR
IMPLEMENTASI PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM PEMENUHAN
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : LARISSA ZUCHNI AURORA

NIM : 126231133

**UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT UNTUK KELULUSAN
PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

**IMPLEMENTASI PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM PEMENUHAN
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUNA**

Laporan Tugas Akhir

Disusun oleh:

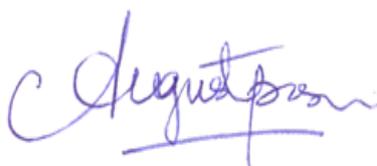


Larissa Zuchni Aurora

126231133

Disetujui oleh:

Pembimbing



Augustpaosa Nariman S.E., M.Ak., Ak., CA., CPA.

ABSTRAK

Penelitian ini mengulas peran auditor internal dalam pemenuhan karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Peran auditor internal dalam pemenuhan karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diulas pada penelitian ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Muna. Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan melalui wawancara kepada narasumber yang merupakan penyusun laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muna dan narasumber dari Inspektorat Daerah Kabupaten Muna sebagai auditor internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Muna melalui pelaksanaan fungsi assurance dan konsultasi berpengaruh dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kata kunci: Auditor Internal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Karakteristik Kualitatif, Assurance dan Konsultasi.

ABSTRACT

This research examines the role of internal auditor in fulfilling the qualitative characteristics of regional government financial statement. The role of internal auditors in fulfilling the qualitative characteristics of the Regional Government Financial Statements discussed in this study is the Regional Inspectorate of Muna Regency. The research method used is a field study through interviews with sources person who are responsible for preparing the regional government financial reports of Muna Regency and sources person from the Regional Inspectorate of Muna Regency as internal auditors. The research findings indicate that the role of the Regional Inspectorate of Muna Regency, through the implementation of assurance and consulting functions, influences the fulfillment of the qualitative characteristics of financial statements, namely relevance, reliable, comparable, and understandable.

Keywords: *Internal Auditor, Regional Government Financial Statement, Qualitative Characteristics, Assurance and Consulting.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat-Nya hingga karya akhir yang berjudul “Implementasi Peran Auditor Internal dalam Pemenuhan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna”. Karya akhir ini dibuat guna memenuhi sebagian persyaratan kelulusan program profesi akuntansi di Universitas Tarumanegara.

Pengerjaan karya akhir ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayah, Ibu, dan Adik yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh untuk setiap langkah yang dijalani oleh penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Rektor Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo, S.E., M.M., MBA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Dr. Jamaluddin Iskak, MSI., Ak., CPI., CA., CPA., selaku Kepala Program Studi Pendidikan Profesi Akuntan Universitas Tarumanegara.
5. Ibu Augustpaosa Nariman, S.E., M.Ak., Ak., CA., CPA., selaku Dosen Pembimbing Karya Akhir yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam pengerjaan karya akhir ini.
6. Semua pihak yang telah berkontribusi yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi dukungan dalam penyelesaian karya akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam karya tulis ini, penulis mohon maaf. Penulis berharap karya akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, Desember 2024

Larissa Zuchni Aurora

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Ruang Lingkup	4
1.5 Tujuan Penelitian	5
1.6 Manfaat Penelitian	5
1.6.1 Manfaat bagi Akademisi	5
1.6.2 Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Muna	5
1.6.3 Manfaat bagi Peneliti	5
1.7 Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	7
2.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	8
BAB III METODE PENELITIAN	13
3.1 Objek Penelitian	13
3.2 Metode Penelitian	13
BAB IV HASIL DAN BAHASAN	15
4.1 Pemenuhan Karakteristik Kualitatif LKPD Kabupaten Muna ...	15
4.2 Peran Auditor Internal Pemerintah Kabupaten Muna Saat Proses Penyusunan LKPD Kabupaten Muna	16
4.3 Peran Auditor Internal Pemerintah Kabupaten Muna Terhadap Pemenuhan Karakteristik Kualitatif LKPD Kabupaten Muna	18
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	22
DAFTAR PUSTAKA	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan suatu instrumen penting pada suatu entitas yang digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan entitas, posisi keuangan entitas di periode tertentu, dan arus kas entitas. Informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan berperan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di sektor publik (Mardiasmo, 2009). Laporan keuangan pemerintah merupakan sarana bagi pemerintah dalam menunjukkan tanggung jawabnya terhadap penggunaan dana publik. Laporan keuangan pemerintah berfungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan oleh publik yang dalam hal ini adalah masyarakat.

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik maka seluruh informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah harus disajikan secara komprehensif. Pada laporan keuangan pemerintah daerah, informasi keuangan dapat dilihat pada halaman muka (*face*) yang dijabarkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketentuan pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sebagaimana *signaling theory* yang mengusulkan sebuah perusahaan atau entitas seharusnya memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang telah dilakukan manajemen untuk mewujudkan keinginan pemilik (Andriawan & Setyawan, 2020). Hal ini juga dapat diterapkan pada pemerintahan dimana manajemen dalam hal ini pemerintah sebagai pengguna dana publik harus memberikan informasi mengenai apa yang telah dilakukannya untuk mewujudkan pertanggungjawabannya kepada publik.

Aktivitas pemerintahan yang sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab publik tersebut menyebabkan pemerintah dihadapkan pada tuntutan publik untuk dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah menghadapi krisis keuangan, baik karena kesalahan pengelolaan anggaran, ketidakmampuan memaksimalkan pendapatan asli daerah, maupun akibat bencana atau kejadian luar biasa seperti pandemi yang berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi (Widoatmodjo & Setyawan, 2023). LKPD yang dihasilkan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai cerminan bahwa LKPD tersebut berkualitas. Tujuan pelaporan keuangan pada organisasi non-bisnis adalah untuk menyediakan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan mengenai alokasi sumber daya dan penggunaan dana publik (Glautier dan Underdown, 2001). Pelaporan keuangan di sektor publik harus memberikan informasi yang berguna untuk evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik (Suwardjono, 2005), serta memfasilitasi pengambilan keputusan oleh pengelola dan pemangku kepentingan.

Dalam menyajikan informasi yang berkualitas dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 1, dimana penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan karakteristik kualitatif yaitu relevan (*relevance*), andal (*reliability*), dapat diperbandingkan (*comparability*), dan dapat dipahami (*understandability*). Kemudian untuk memastikan karakteristik kualitatif tersebut telah terpenuhi dibutuhkan fungsi pengawasan internal. Pengawasan internal berfungsi menilai secara objektif dan independen penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota di Instansi Pemerintah (Djalil, 2014). Teori keagenan mengasumsikan bahwa motivasi utama individu adalah kepentingan pribadinya, yang pada gilirannya memunculkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Andriawan & Setyawan, 2020). Lebih lanjut, adanya hubungan prinsipal dan keagenan juga memunculkan informasi asimetris dalam suatu organisasi yang mana agen

memiliki informasi yang lebih dibandingkan prinsipal, sehingga diperlukan adanya suatu tanggung jawab yang transparan dan akuntabel dari agen ke prinsipal (Setyawan et al, 2022).

Pengawasan internal pada pemerintah daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 memberikan pedoman mengenai pengawasan dan pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan. Implementasi SPIP pada pemerintah daerah harus mencakup pengawasan atas seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan belanja, hingga penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu APIP tidak hanya sebagai pengawas, namun juga bersinergi sebagai mitra kerja dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. APIP memiliki peran penting dalam membantu perbaikan manajemen dan kegiatan penjaminan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*) yang dilaksanakan sesuai ketentuan. APIP bertugas menjamin rangkaian kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan agar diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sehingga dapat mewujudkan pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan (Diani,2014).

Pemenuhan karakteristik kualitatif LKPD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi publik serta implementasi peran auditor internal sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi pemenuhan karakteristik kualitatif LKPD tersebut menjadi hal yang menarik untuk diulas. Hal tersebut melatarbelakangi penulisan penelitian terkait implementasi peran auditor internal dalam pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Muna. Penelitian terdahulu banyak membahas mengenai peran auditor internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah dengan menggunakan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini mengulas kualitas laporan keuangan secara lebih

komprehensif berdasarkan pemenuhan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan bagaimana auditor internal berperan dalam mewujudkannya.

1.2 Pokok Permasalahan

Penelitian ini ingin melihat apakah karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna telah terpenuhi. Apakah auditor internal Pemerintah Kabupaten Muna memiliki peran dalam pemenuhan karakteristik kualitatif LKPD Kabupaten Muna. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh auditor internal Pemerintah Kabupaten Muna dalam melakukan pengawasan penyusunan LKPD Kabupaten Muna. Apakah auditor internal melakukan reviu sebelum laporan keuangan diterbitkan dan sejauh apa reviu yang dilakukan terkait kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apakah LKPD Kabupaten Muna telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan?
2. Apakah auditor internal Pemerintah Kabupaten Muna memiliki peran saat proses penyusunan LKPD Kabupaten Muna?
3. Apakah peran auditor internal Pemerintah Kabupaten Muna berpengaruh dalam pemenuhan karakteristik kualitatif LKPD Kabupaten Muna?

1.4 Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.
2. Analisis kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun.

3. Peran auditor internal Pemerintah Kabupaten Muna yang dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Muna.
4. Tahun anggaran 2023.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. mengetahui pemenuhan karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
2. mengetahui peran auditor internal Pemerintah Kabupaten Muna saat proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna.
3. mengetahui pengaruh dari peran auditor internal Pemerintah Kabupaten Muna terhadap pemenuhan karakteristik kualitatif LKPD Kabupaten Muna.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi akademisi untuk melakukan kajian atau penelitian sejenis serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam studi terkait peran auditor internal pemerintah.

1.6.2 Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Muna

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan peran auditor internal Pemerintah Kabupaten Muna dalam pemenuhan karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna. Menjadi bahan pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran pengawasan pada Pemerintah Kabupaten Muna.

1.6.3 Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu persyaratan mencapai gelar Akuntan (Ak) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara serta dapat meningkatkan pengetahuan peneliti dalam hal menilai kualitas laporan

keuangan dan peran auditor internal terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada karya akhir ini terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, masalah/isu pokok dari topik yang diteliti, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori berisi uraian teori dan konsep terkait dengan penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, karakteristik kualitatif laporan keuangan, dan peran auditor internal pada pemerintah daerah.

Bab III Metode Penelitian berisi uraian objek penelitian dan metode penelitian yang meliputi metode perolehan data, metode pengolahan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil dan Bahasan berisi hasil analisis kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, peran Inspektorat Daerah Kabupaten Muna dalam pemenuhan karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, dan analisis pengaruh peran Inspektorat Daerah Kabupaten Muna terhadap pemenuhan karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Bab V Simpulan dan Saran membahas tentang simpulan untuk menjawab permasalahan berupa pengaruh peran Inspektorat Daerah Kabupaten Muna terhadap pemenuhan karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna serta saran yang berisi usulan untuk pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan & Setyawan, I. R. (2020). Earning Management Actions and Conditional Revenue as Managerial Efforts to Maintain Bond Rating. *The Indonesian Journal of Accounting Research*. Vol 23 No. 3.
- Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. *Rineka Cipta*.
- BPKP. (2016). *PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DAERAH*.
- Cresswell, J. (1998). Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches. *Thousand Oaks CA: Sage Publications*.
- Dewi, S. (2023). Implementasi Peran Auditor Internal dalam Pemenuhan Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. *Jurnal BPPK*. Vol 16 No 1.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*. Vol 2 No 1. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/897>.
- Djalil, R. (2014). Akuntabilitas Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Wahana Semesta Intermedia.
- Ervina, N., & Salim, S. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Audit Report Lag* Tahun 2019-2020. *Jurnal Ekonomi, SPESIAL ISSUE*. November 2021: 37-58.
- Glautier, M. W. E., & Underdown, B. (2001). *Accounting Theory and Practice (6th ed.)*. Financial Times/Prentice Hall
- Indra., Iskak, J., & Khaq, A. (2022). Enhancing the Role of the Audit Board of the Republic of Indonesia in Fraud Detection. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. Vol 8 No 1.
- Istiqomah, N., Badar, M., & Wahid, A. (2022). Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas Keuangan dalam Mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan. *Equity*, 22(2), 153-172. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.1367>.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik (Edisi IV), Yogyakarta, Andi.
- Mayadiana, S. (2014). Peran Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Periode 2009-2013. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Mukoffi, A., Sulistyowato, Y., Maristela, R., & Reda, I. (2023). Pengaruh Audit Laporan Keuangan, Penerapan Good Governance, dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan*

Akuntansi), Vol 6, 12-20.
<https://doi.org/10.30596/liabilities.v6i2.14890>

Nazaruddin. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*. Vol 3 No 1.
<https://jaktabangun.stie-lhokseumawe.ac.id/index.php/jtb/article/view/46/36>

Prathitaningtyas, F., Raissa, M. A. N., & Rahmatika, D. N. (2024). *Systematic Literature Review: Pengaruh Audit Laporan Keuangan dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*. Vol 1 No 3.
<https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP/article/view/320/545>.

Republik Indonesia. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA*.

Republik Indonesia. (2004). *UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA*.

Republik Indonesia. (2006). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*.

Republik Indonesia. (2008). *PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH*.

Republik Indonesia. (2010). *PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*.

Republik Indonesia. (2011). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*.

Republik Indonesia. (2013). *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH*.

Republik Indonesia (2014). *PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)*.

Sasmita, D. A., Nasrizal., Rasuli, M. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Auditor Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*. Vol 15 No 2. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.28>

Setijaningsih, H. T., Handoyo, S. E., & Sundari, N. (2021). Factors Affecting The Selection of Fair Value Methods for Investment Property. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*. 17 (1) 2021.

Setyawan, I. R, Ekadjaja, M., & Ekadjaja, A. (2022). Industry Market Structure and

Banking Performance in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. Vol 11 No 2.

Suherman, A. (2017). Pengaruh Audit Internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Edukasi*. Vol 5 No 2.
<https://jurnal.unigal.ac.id/edukasi/article/viewFile/957/848>.

Suwardjono. (2005). Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan (Edisi III), Yogyakarta, BPFE.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta*.

Syarifudin, A. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Audit Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*. Vol 12 No 2.
<https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v13i2.22>

Widoatmodjo, S., & Setyawan, I. R. (2023). Special Treatment to Bank CEOs in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(2), 137–147.
<https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0037>